



Katalog BPS: 4601003.33

STATISTIK POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH 2011

<http://jateng.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

**STATISTIK POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
2011**

<http://jateng.bps.go.id>

STATISTIK POLITIK

PROVINSI JAWA TENGAH 2011

No. Publikasi : 33523.1207
Katalog BPS : 4601003.33
Ukuran Buku : 16 cm x 24 cm
Jumlah Halaman : vii + 46 halaman

Naskah :

Seksi Statistik Ketahanan Sosial

Bidang Statistik Sosial

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Pengarah : R. Lukito Praptoprijoko, MA

Penanggung Jawab : Erisman, MSi

Editor : Ir. Sutirin, MM

Penulis : Herlina, S.ST

Tabulasi : 1. Herlina, S.ST
2. Rina Kartiningrum, S.S.T
3. Purwo Santoso

Gambar Kulit :

Seksi Statistik Ketahanan Sosial

Bidang Statistik Sosial

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 merupakan sajian hasil Survei Politik dan Keamanan tahun 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data yang disajikan tentang keadaan politik di Jawa Tengah tahun 2011.

Data politik yang dicakup dalam publikasi ini meliputi data partisipasi penduduk dalam pemilihan umum, perolehan suara partai politik, jumlah anggota DPRD Provinsi menurut asal partai, pelaksanaan pilkada gubernur maupun bupati/walikota dan hasilnya. Dalam publikasi ini disajikan pula penjelasan mengenai lingkup data dan istilah teknis yang digunakan, sehingga pengguna data akan lebih memahami informasi yang disajikan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga publikasi ini dapat disajikan, disampaikan ucapan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, Juli 2012
BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala,

R. LUKITO PRAPTOPRIJOKO, MA
NIP. 195309211976031001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
Bab II METODOLOGI	3
2.1 Sumber Data	3
2.2 Metode Pengumpulan Data	3
2.3 Konsep dan Definisi	3
Bab III LEMBAGA POLITIK	7
3.1 Lembaga Swadaya Masyarakat	7
3.2 Partai Politik	8
Bab IV KEGIATAN POLITIK	10
4.1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	10
4.2 Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	10
4.3 Pemilihan Umum Kepala Daerah	11
Lampiran	13
Daftar Pustaka	45
Referensi Internet	46

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011	14
Tabel 2	Jumlah Organisasi massa Terdaftar Tahun 2010 dan 2011	15
Tabel 3	Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009	16
Tabel 4	Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah	17
Tabel 5	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009	18
Tabel 6	Jumlah Suara Sah, Suara Tidak sah dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009 untuk Memilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota	19

Tabel 7	Perolehan Suara Sah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemilu Legislatif 2009 menurut Kabupaten/Kota dan Partai Politik	20
Tabel 8	Perolehan Suara Sah Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Legislatif 2009 menurut Kabupaten/Kota dan Partai Politik	28
Tabel 9	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin, Hasil Pemilu Legislatif 2009	36
Tabel 10	Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2007 - 2011	37
Tabel 11	Jumlah penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada Gubernur Tahun 2008	38
Tabel 12	Jumlah Pemilih, Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pilkada Gubernur Jawa Tengah menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2008	39
Tabel 13	Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Dalam Pilkada Bupati/Walikota Tahun 2005-2008 dan Tahun 2010-2011	40
Tabel 14	Jumlah Suara Sah, Suara Tidak sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada Bupati/Walikota Tahun 2007-2011	41

Tabel 15	Perolehan Suara Kepala Daerah dan Partai Pengusungnya, 2007-2011	42
Tabel 16	Nama Kepala Daerah Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Jabatan Sebelumnya dan Tanggal Pelantikan	43

<http://jateng.bps.go.id>

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era reformasi yang terjadi di Indonesia membawa perubahan yang sangat signifikan pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Di bidang politik, perubahan sangat terasa dibandingkan dengan era sebelumnya. Kebekuan politik di era orde baru mencair pada era reformasi. Kebebasan berkumpul dan berpendapat dirasakan masyarakat lebih terjamin. Hal ini terlihat nyata dari maraknya berbagai demonstrasi dalam menyalurkan aspirasi dan pendapat. Mengungkapkan ketidaksetujuan (“menentang”) kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah maupun institusi swasta (perusahaan), yang diwujudkan dalam bentuk demonstrasi massa merupakan bagian dari kegiatan politik masyarakat yang lebih marak dibandingkan dengan yang terjadi di era orde baru.

Perubahan pada sistem penyelenggaraan pemerintah daerah juga sangat dirasakan, terutama sejak diundangkannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada tanggal 18 Agustus 2000. Hal yang mendasar dengan diberlakukannya UUD 1945 tersebut adalah pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan daerah (Pilkada) dan legitimasi pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Sejak itu pula, beberapa daerah pemerintahan baru terbentuk, yang memisahkan dari provinsi, kabupaten/kota induknya.

Perkembangan bidang politik yang demikian cepat seringkali berimbas, baik langsung maupun tidak, terhadap kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi politik yang kondusif merupakan langkah strategis yang perlu terus menerus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil makmur.

1.2. Tujuan

Penyusunan publikasi Statistik Politik Provinsi Jawa Tengah 2011 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik politik secara berkala dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan perkembangan politik di Jawa Tengah. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan khususnya sektoral di bidang politik serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan data tentang keadaan politik yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah yang dirinci menurut Kabupaten/Kota.

BAB. II. METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik Provinsi Jawa Tengah 2011 ini bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Nara sumber Survei Politik dan Keamanan terdiri dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Instansi provinsi sebagai nara sumber terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan instansi kabupaten/kota yang menjadi nara sumber terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, serta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan publikasi Statistik Politik Provinsi Jawa Tengah 2011 ini dikumpulkan melalui kompilasi data dari hasil registrasi/catatan instansi terkait secara berjenjang. BPS Kabupaten/Kota mengumpulkan data dari instansi terkait untuk kemudian dikirim ke BPS Provinsi Jawa Tengah. Pada tingkat provinsi, BPS Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kompilasi data dari instansi yang menjadi nara sumber. Selanjutnya data yang sudah masuk dari kabupaten/kota serta data yang dikompilasi di tingkat provinsi diolah menjadi tabel-tabel yang disajikan dalam lampiran pada publikasi Statistik Politik Provinsi Jawa Tengah 2011 ini.

2.3. Konsep dan Definisi

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini serta jenis sumber data yang menghasilkan data tersebut, konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini juga merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Undang-Undang nomor 32 tahun 2004).

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang nomor 32 tahun 2004).

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang nomor 32 tahun 2004).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang nomor 32 tahun 2004).

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang nomor 22 tahun 2007).

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang nomor 22 tahun 2007).

Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri (Undang-Undang nomor 10 tahun 2008).

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-Undang nomor 10 tahun 2008).

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (Undang-Undang nomor 10 tahun 2008).

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (Undang-Undang nomor 10 tahun 2008).

Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu), yaitu:

- 1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan,:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b

- dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- f. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
 - g. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
- 2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

Golongan Putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.

BAB III. LEMBAGA POLITIK

Lembaga-lembaga politik merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik.

Di Indonesia konstitusi negara menjamin bagi warganya untuk berorganisasi dan berkelompok sebagai sarana menyampaikan pendapat. Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal tersebut merupakan salah satu pasal yang dimaksudkan oleh pendiri negara untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

3.1. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah suatu organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan dari kegiatannya (dikutip dari: www.wikipedia.org). LSM lahir sebagai cerminan dari kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Pembentukan LSM seringkali dimotivasi adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan perombakan sosial ekonomi.

LSM merupakan salah satu sarana yang telah memberikan kontribusi bermanfaat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai alat kontrol dan pendamping pemerintah. Lembaga-lembaga semacam ini yang seringkali menjadi penggerak terjadinya perubahan-perubahan tatanan sosial masyarakat melalui cara-cara politik.

Tabel 2 (Lampiran) menyajikan jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar tahun 2010 dan 2011. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari

35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, jumlah LSM terdaftar selama tahun 2010-2011 terbanyak berada di Kabupaten Batang yaitu sejumlah 145 LSM. Sedangkan Kabupaten Purworejo merupakan kabupaten dengan jumlah LSM paling sedikit, yang terdaftar selama tahun 2010-2011. Untuk LSM yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah yang terdaftar selama tahun 2010-2011 sebanyak 359 LSM.

3.2. Partai Politik

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik mendefinisikan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sistem kepartaian di Indonesia dikenal dengan sistem multi partai, terutama di era orde lama dan era reformasi sekarang ini. Partai politik bukanlah sebatas partai politik peserta Pemilu namun semua partai politik yang mendaftarkan diri ke Departemen hukum dan HAM sebagai badan hukum. Era reformasi telah memecahkan kebekuan istem kepartaian di Indonesia yang selama Orde baru jumlah partai hanya tiga partai dengan azas tunggal, saat ini telah berdiri puluhan partai dengan azas beragam.

Kebanyakan partai politik berdiri dalam rangka mengikuti Pemilu sehingga pada umumnya kelahiran partai politik terjadi pada tahun-tahun menjelang Pemilu diadakan. Namun pada kenyataannya tidak semua partai politik dapat mengikuti Pemilu karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tabel 2 menunjukkan jumlah partai politik yang terdaftar tahun 2010-2011 di kabupaten/kota se provinsi Jawa Tengah. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2010-

2011, jumlah partai politik yang terdaftar untuk tingkat provinsi mencapai 38 partai politik. Untuk tingkat kabupaten/kota, jumlah partai politik berkisar antara 22 – 37 partai politik. Jumlah partai politik terbanyak, terdaftar di kabupaten Demak, yaitu sejumlah 37 partai politik. Sedangkan di Kabupaten Kebumen, terdaftar 22 partai politik.

<http://jateng.bps.go.id>

BAB IV. KEGIATAN POLITIK

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai kegiatan politik di Jawa Tengah. Informasi politik yang disajikan mencakup: pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dan pemilu kepala daerah (pilkada).

4.1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang Dasar juga menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jumlah suara sah dan suara tidak sah pada pemilu presiden dan wakil presiden di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam lampiran pada tabel 3 dan tabel 4.

4.2. Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 24 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan

kabupaten/kota. Sedangkan pasal 207 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Mengenai alokasi jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam pasal 23 dan pasal 26 Undang-undang tersebut. Jumlah suara sah dan tidak sah pada pemilu legislatif 2009 untuk memilih anggota DPRD Provinsi dari setiap kabupaten/kota dan anggota DPRD Kabupaten/Kota menurut partai politik peserta pemilu 2009 tersaji dalam lampiran pada tabel 5 sampai dengan tabel 9.

4.3. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu tahap pencapaian baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut paling tidak secara prosedural kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui Pilkada secara langsung, rakyat menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tanpa keterlibatan dan intervensi DPRD. Format pilkada secara langsung didasarkan pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menyusul keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan judicial review sejumlah KPUD atas UU tersebut. Sebagai operasionalisasi dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Perpu, pemerintah menertibkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005.

Berkaitan dengan pencalonan, berbagai regulasi tentang pilkada tersebut mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang perolehan kursi atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai yang berada di luar parlemen lokal tersebut. Mengenai mekanisme pencalonan, ayat 1, 3, dan 5 Pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 secara berturut-turut mengatur bahwa:

- Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;
- Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;
- Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam parpol atau gabungan parpol.

Aspirasi publik yang menginginkan adanya calon perseorangan atau “independen” kemudian dilegalisasi dengan keluarnya putusan mahkamah konstitusi yang membuka peluang untuk calon independen untuk turut maju ke kancah pemilihan kepala daerah secara langsung. Hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditampilkan dalam lampiran pada tabel 10 sampai dengan tabel 16.

Selama tahun 2011, pemilihan umum kepala daerah telah dilaksanakan di delapan kabupaten/kota, antara lain: Kabupaten Grobogan, Demak, Sragen, Pekalongan, Pati, Banjarnegara, Batang serta Kota Salatiga. Dari delapan kegiatan pemilihan kepala daerah tersebut telah ditetapkan dan dilantik tujuh pasangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota. Satu kabupaten, yaitu Kabupaten Pati, belum dilaksanakan pelantikan dikarenakan pemilihan kepala daerah untuk putaran ke dua baru akan dilaksanakan pada tahun 2012. Nama-nama kepala daerah yang terpilih dan menjabat selama tahun 2011 disajikan dalam Tabel 16 pada lampiran.

LAMPIRAN

<http://jateng.bps.go.id>

Tabel 1. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Ke-lurahan	Jumlah Penduduk ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	2.138,51	24	284	1.651.940
2	Kab. Banyumas	1.327,59	27	331	1.570.598
3	Kab. Purbalingga	777,65	18	239	858.798
4	Kab. Banjarnegara	1.069,71	20	278	875.214
5	Kab. Kebumen	1.281,12	26	460	1.162.294
6	Kab. Purworejo	1.034,82	16	494	696.141
7	Kab. Wonosobo	948,68	15	265	758.993
8	Kab. Magelang	1.085,73	21	372	1.194.353
9	Kab. Boyolali	1.015,10	19	267	936.822
10	Kab. Klaten	655,56	26	401	1.135.201
11	Kab. Sukoharjo	466,66	12	167	832.094
12	Kab. Wonogiri	1.822,36	25	294	929.870
13	Kab. Karanganyar	773,79	17	177	821.694
14	Kab. Sragen	941,55	20	208	861.939
15	Kab. Grobogan	1.975,86	19	280	1.316.693
16	Kab. Blora	1.820,59	16	295	833.786
17	Kab. Rembang	1.014,08	14	294	596.801
18	Kab. Pati	1.503,68	21	406	1.198.935
19	Kab. Kudus	456,16	9	132	788.264
20	Kab. Jepara	1.004,13	16	194	1.115.688
21	Kab. Demak	897,43	14	249	1.067.993
22	Kab. Semarang	950,21	19	235	944.877
23	Kab. Temanggung	870,23	20	289	715.907
24	Kab. Kendal	1.002,23	20	286	908.533
25	Kab. Batang	788,64	15	248	713.942
26	Kab. Pekalongan	836,13	19	285	845.471
27	Kab. Pemalang	1.15,31	14	222	1.264.535
28	Kab. Tegal	878,79	18	287	1.399.789
29	Kab. Brebes	1.657,73	17	297	1.742.528
30	Kota Magelang	18,12	3	17	118.606
31	Kota Surakarta	44,04	5	51	501.650
32	Kota Salatiga	56,78	4	22	173.056
33	Kota Semarang	373,70	16	177	1.585.417
34	Kota Pekalongan	45,25	4	47	284.413
35	Kota Tegal	39,68	4	27	240.777
	Provinsi Jawa Tengah	32.687,59	573	8.577	32.643.612

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

*) Data Sementara, Hasil Proyeksi berdasarkan SP2010 BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2. Jumlah Organisasi Massa Terdaftar Tahun 2010 dan 2011

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik	Lembaga Swadaya Masyarakat	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	31	36	99	
2	Kab. Banyumas	34	7	265	
3	Kab. Purbalingga	26	13	18	
4	Kab. Banjarnegara	23	10	88	
5	Kab. Kebumen	22	34	92	
6	Kab. Purworejo	26	1	96	
7	Kab. Wonosobo	27	61	103	
8	Kab. Magelang	30	10	36	
9	Kab. Boyolali	29	44	26	
10	Kab. Klaten	32	31	137	
11	Kab. Sukoharjo	25	103	95	
12	Kab. Wonogiri	27	21	65	
13	Kab. Karanganyar	25	53	55	
14	Kab. Sragen	31	95	119	
15	Kab. Grobogan	26	44	11	
16	Kab. Blora	28	11	140	
17	Kab. Rembang	27	33	101	
18	Kab. Pati	27	54	48	
19	Kab. Kudus	33	11	71	
20	Kab. Jepara	33	70	91	
21	Kab. Demak	37	96	96	
22	Kab. Semarang	24	24	91	
23	Kab. Temanggung	26	12	39	
24	Kab. Kendal	33	45	109	
25	Kab. Batang	25	145	101	
26	Kab. Pekalongan	31	44	68	
27	Kab. Pemasang	26	24	44	
28	Kab. Tegal	33	50	69	
29	Kab. Brebes	26	27	65	
30	Kota Magelang	26	14	182	
31	Kota Surakarta	33	45	108	
32	Kota Salatiga	30	4	1	
33	Kota Semarang	34	85	263	
34	Kota Pekalongan	27	10	55	
35	Kota Tegal	33	7	92	
Provinsi Jawa Tengah		38	359	392	94

Sumber: Kesbangpolinmas Kab/Kota

Tabel 3. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009

No	Kabupaten/Kota	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009	
		Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Cilacap	1.391.399	958.076
2	Kab. Banyumas	1.262.347	927.776
3	Kab. Purbalingga	684.967	483.998
4	Kab. Banjarnegara	727.125	506.747
5	Kab. Kebumen	970.606	674.263
6	Kab. Purworejo	614.728	425.626
7	Kab. Wonosobo	611.130	465.888
8	Kab. Magelang	918.840	732.036
9	Kab. Boyolali	768.093	564.924
10	Kab. Klaten	1.008.862	721.206
11	Kab. Sukoharjo	661.650	473.742
12	Kab. Wonogiri	896.509	583.981
13	Kab. Karanganyar	667.454	487.054
14	Kab. Sragen	733.395	510.968
15	Kab. Grobogan	1.045.477	726.776
16	Kab. Blora	686.635	496.355
17	Kab. Rembang	464.342	350.319
18	Kab. Pati	1.006.452	689.230
19	Kab. Kudus	585.482	415.607
20	Kab. Jepara	813.802	573.816
21	Kab. Demak	795.653	557.023
22	Kab. Semarang	729.393	551.921
23	Kab. Temanggung	562.975	462.619
24	Kab. Kendal	734.999	539.643
25	Kab. Batang	555.314	419.158
26	Kab. Pekalongan	666.676	447.908
27	Kab. Pemalang	1.060.230	672.501
28	Kab. Tegal	1.153.764	728.419
29	Kab. Brebes	1.424.055	911.510
30	Kota Magelang	93.330	72.571
31	Kota Surakarta	398.446	302.805
32	Kota Salatiga	126.375	101.951
33	Kota Semarang	1.094.832	862.166
34	Kota Pekalongan	210.859	155.837
35	Kota Tegal	197.399	136.726
	Provinsi Jawa Tengah	26.323.595	18.691.146

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	904.598	53.478	433.323
2	Kab. Banyumas	875.692	52.084	334.571
3	Kab. Purbalingga	448.944	35.054	200.969
4	Kab. Banjarnegara	469.302	37.445	220.378
5	Kab. Kebumen	626.897	47.366	296.343
6	Kab. Purworejo	400.266	25.360	189.102
7	Kab. Wonosobo	427.136	38.752	145.242
8	Kab. Magelang	679.430	52.606	186.804
9	Kab. Boyolali	524.673	40.251	203.169
10	Kab. Klaten	678.264	42.942	287.656
11	Kab. Sukoharjo	444.431	29.311	187.908
12	Kab. Wonogiri	550.246	33.735	312.528
13	Kab. Karanganyar	457.878	29.176	180.400
14	Kab. Sragen	473.381	37.587	222.427
15	Kab. Grobogan	682.699	44.077	318.701
16	Kab. Blora	458.292	38.063	190.280
17	Kab. Rembang	322.274	28.045	114.023
18	Kab. Pati	642.283	46.947	317.222
19	Kab. Kudus	394.675	20.932	169.875
20	Kab. Jepara	541.911	31.905	239.986
21	Kab. Demak	525.919	31.104	238.630
22	Kab. Semarang	515.158	36.763	177.472
23	Kab. Temanggung	427.278	35.341	100.356
24	Kab. Kendal	506.190	33.453	195.356
25	Kab. Batang	393.606	25.552	136.156
26	Kab. Pekalongan	416.892	31.016	218.768
27	Kab. Pemalang	621.983	50.518	387.729
28	Kab. Tegal	680.367	48.052	425.345
29	Kab. Brebes	849.608	61.902	512.545
30	Kota Magelang	68.135	4.436	20.759
31	Kota Surakarta	286.483	16.322	95.641
32	Kota Salatiga	96.810	5.141	24.424
33	Kota Semarang	824.419	37.747	232.666
34	Kota Pekalongan	145.695	10.142	55.022
35	Kota Tegal	128.614	8.112	60.673
Provinsi Jawa Tengah		17.490.429	1.200.717	7.632.449

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 5. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2009

No	Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2009	
		Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Cilacap	1.373.704	940.895
2	Kab. Banyumas	1.271.777	894.165
3	Kab. Purbalingga	680.641	484.848
4	Kab. Banjarnegara	721.927	517.342
5	Kab. Kebumen	962.567	654.527
6	Kab. Purworejo	620.652	421.394
7	Kab. Wonosobo	603.549	461.151
8	Kab. Magelang	912.400	729.317
9	Kab. Boyolali	772.508	578.881
10	Kab. Klaten	1.013.986	729.438
11	Kab. Sukoharjo	651.182	459.772
12	Kab. Wonogiri	901.215	599.481
13	Kab. Karanganyar	666.337	499.734
14	Kab. Sragen	731.008	526.725
15	Kab. Grobogan	1.039.071	747.000
16	Kab. Blora	697.350	519.139
17	Kab. Rembang	462.753	382.975
18	Kab. Pati	1.003.299	727.029
19	Kab. Kudus	580.925	449.734
20	Kab. Jepara	808.800	579.490
21	Kab. Demak	787.246	571.998
22	Kab. Semarang	720.542	546.052
23	Kab. Temanggung	561.394	463.551
24	Kab. Kendal	727.107	533.537
25	Kab. Batang	558.991	421.532
26	Kab. Pekalongan	659.972	457.665
27	Kab. Pemalang	1.052.230	666.235
28	Kab. Tegal	1.142.163	709.215
29	Kab. Brebes	1.403.827	873.284
30	Kota Magelang	93.640	70.985
31	Kota Surakarta	392.494	281.798
32	Kota Salatiga	122.779	101.075
33	Kota Semarang	1.087.463	776.535
34	Kota Pekalongan	206.318	153.708
35	Kota Tegal	198.812	133.091
Provinsi Jawa Tengah		26.190.629	18.663.298

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, Dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu Legislatif 2009 untuk Memilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Pemilu Legislatif 2009 pemilihan DPRD Provinsi		
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	837.760	103.135	432.809
2	Kab. Banyumas	761.564	132.601	377.612
3	Kab. Purbalingga	372.538	112.310	195.793
4	Kab. Banjarnegara	425.824	91.518	204.585
5	Kab. Kebumen	550.596	103.931	308.040
6	Kab. Purworejo	362.301	59.093	199.258
7	Kab. Wonosobo	361.731	99.420	142.398
8	Kab. Magelang	615.348	113.969	183.083
9	Kab. Boyolali	461.969	116.912	193.627
10	Kab. Klaten	593.710	135.728	284.548
11	Kab. Sukoharjo	370.750	89.022	191.410
12	Kab. Wonogiri	532.029	67.452	301.734
13	Kab. Karanganyar	397.344	102.390	166.603
14	Kab. Sragen	393.122	133.603	204.283
15	Kab. Grobogan	599.112	147.888	292.071
16	Kab. Blora	404.464	114.675	178.211
17	Kab. Rembang	255.057	127.918	79.778
18	Kab. Pati	531.510	195.519	276.270
19	Kab. Kudus	306.868	142.866	131.191
20	Kab. Jepara	465.716	113.774	229.310
21	Kab. Demak	410.461	161.537	215.248
22	Kab. Semarang	444.134	101.918	174.490
23	Kab. Temanggung	379.171	84.380	97.843
24	Kab. Kendal	412.160	121.377	193.570
25	Kab. Batang	320.443	101.089	137.459
26	Kab. Pekalongan	336.471	121.194	202.307
27	Kab. Pemalang	528.376	137.859	385.995
28	Kab. Tegal	548.280	160.935	432.948
29	Kab. Brebes	713.299	159.985	530.543
30	Kota Magelang	57.935	13.050	22.655
31	Kota Surakarta	244.005	37.793	110.696
32	Kota Salatiga	77.441	23.634	21.704
33	Kota Semarang	671.159	105.376	310.928
34	Kota Pekalongan	113.164	40.544	52.610
35	Kota Tegal	106.248	26.843	65.721
Provinsi Jawa Tengah		14.962.060	3.701.238	7.527.331

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 7. Perolehan Suara Sah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Legislatif 2009 menurut Kabupaten/Kota dan Partai Politik

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	22.272	19.021	5.738	10.993	46.938
2	Kab. Banyumas	18.093	13.365	5.192	11.335	41.948
3	Kab. Purbalingga	6.550	4.730	2.101	3.599	12.659
4	Kab. Banjarnegara	10.221	5.595	3.005	3.294	17.646
5	Kab. Kebumen	9.143	10.823	3.836	6.765	26.581
6	Kab. Purworejo	6.206	4.796	3.416	7.523	17.873
7	Kab. Wonosobo	13.196	4.401	2.439	4.019	17.699
8	Kab. Magelang	21.800	6.478	3.751	6.506	35.188
9	Kab. Boyolali	16.373	7.956	2.198	5.426	19.031
10	Kab. Klaten	17.306	7.940	2.526	4.357	31.906
11	Kab. Sukoharjo	8.682	3.773	1.635	2.968	13.996
12	Kab. Wonogiri	8.958	8.119	3.001	5.474	21.589
13	Kab. Karanganyar	11.830	11.913	2.936	3.621	17.080
14	Kab. Sragen	9.532	7.710	2.092	8.387	14.164
15	Kab. Grobogan	23.809	14.974	7.601	5.785	41.020
16	Kab. Blora	19.491	6.680	3.430	4.912	23.682
17	Kab. Rembang	6.705	4.955	1.132	1.788	12.613
18	Kab. Pati	12.870	13.979	3.641	3.413	61.307
19	Kab. Kudus	11.388	11.358	3.689	1.965	17.223
20	Kab. Jepara	22.790	10.568	2.480	3.795	49.122
21	Kab. Demak	12.625	10.914	3.033	4.509	23.668
22	Kab. Semarang	17.680	7.633	2.619	3.897	26.003
23	Kab. Temanggung	16.358	5.535	2.453	3.359	19.522
24	Kab. Kendal	20.401	8.133	2.774	3.333	17.989
25	Kab. Batang	18.725	7.014	2.282	4.456	18.104
26	Kab. Pekalongan	11.056	7.279	1.888	3.516	12.265
27	Kab. Pemasang	16.165	8.470	3.498	6.620	26.350
28	Kab. Tegal	14.850	10.164	4.237	7.040	22.967
29	Kab. Brebes	22.864	14.618	6.271	10.859	30.845
30	Kota Magelang	935	207	138	443	2.330
31	Kota Surakarta	7.465	1.062	599	991	9.451
32	Kota Salatiga	2.934	816	299	731	4.089
33	Kota Semarang	17.364	5.151	2.651	3.125	40.499
34	Kota Pekalongan	2.697	656	284	597	3.837
35	Kota Tegal	3.584	1.387	589	1.417	3.775
Provinsi Jawa Tengah		462.918	268.173	99.454	160.818	800.959

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Barisan Nasional (BARNAS)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kab. Cilacap	4.727	2.841	45.034	59.806	0
2	Kab. Banyumas	3.406	2.517	45.739	63.608	0
3	Kab. Purbalingga	2.409	2.153	29.071	32.018	0
4	Kab. Banjarnegara	2.793	2.841	32.734	58.395	0
5	Kab. Kebumen	5.602	4.693	32.953	32.817	0
6	Kab. Purworejo	1.524	1.236	21.447	13.171	0
7	Kab. Wonosobo	2.269	1.984	13.748	29.913	0
8	Kab. Magelang	1.903	1.723	44.608	50.835	0
9	Kab. Boyolali	2.576	1.886	39.515	56.449	0
10	Kab. Klaten	3.410	2.679	63.366	62.738	0
11	Kab. Sukoharjo	1.286	2.377	42.111	30.123	0
12	Kab. Wonogiri	3.918	2.026	50.903	30.780	0
13	Kab. Karanganyar	2.628	6.088	44.231	25.733	0
14	Kab. Sragen	2.744	1.315	40.754	19.093	0
15	Kab. Grobogan	3.122	4.824	25.227	17.821	1.221
16	Kab. Blora	2.119	5.331	18.890	11.193	7.176
17	Kab. Rembang	1.273	547	11.949	8.418	92
18	Kab. Pati	6.967	3.307	31.882	10.257	511
19	Kab. Kudus	3.471	584	21.197	27.170	1.322
20	Kab. Jepara	7.669	2.932	22.119	21.681	298
21	Kab. Demak	7.805	2.411	31.978	14.546	573
22	Kab. Semarang	3.151	8.700	39.878	22.606	0
23	Kab. Temanggung	1.439	2.549	22.468	32.855	0
24	Kab. Kendal	1.731	1.985	26.192	27.756	0
25	Kab. Batang	3.134	812	12.157	21.232	0
26	Kab. Pekalongan	3.045	1.070	12.780	33.862	0
27	Kab. Pemalang	4.608	2.684	36.431	38.074	0
28	Kab. Tegal	2.255	3.000	46.619	31.278	0
29	Kab. Brebes	5.904	4.133	44.690	50.330	0
30	Kota Magelang	382	648	5.055	4.011	0
31	Kota Surakarta	677	1.152	25.993	13.174	0
32	Kota Salatiga	359	2.784	9.336	3.218	0
33	Kota Semarang	3.863	5.181	68.163	24.715	0
34	Kota Pekalongan	279	251	7.016	18.144	0
35	Kota Tegal	1.247	454	9.144	6.449	0
Provinsi Jawa Tengah		105.695	91.698	1.075.378	1.004.269	11.193

Sumber: KPUD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Keadaulatan (PK)	Partai Persatuan Daerah (PPD)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Kab. Cilacap	2.439	1.254	32.114	0	1.531
2	Kab. Banyumas	3.017	846	52.624	0	1.453
3	Kab. Purbalingga	508	496	24.217	0	569
4	Kab. Banjarnegara	711	809	28.700	0	704
5	Kab. Kebumen	1.004	845	28.598	0	705
6	Kab. Purworejo	480	914	32.043	1.847	549
7	Kab. Wonosobo	421	636	58.168	664	414
8	Kab. Magelang	809	1.036	73.003	709	485
9	Kab. Boyolali	1.578	795	18.468	828	1.081
10	Kab. Klaten	1.818	944	13.168	617	1.924
11	Kab. Sukoharjo	1.308	1.558	11.400	604	867
12	Kab. Wonogiri	765	687	4.739	1.005	1.940
13	Kab. Karanganyar	1.799	2.651	11.747	1.276	844
14	Kab. Sragen	1.004	517	19.293	995	847
15	Kab. Grobogan	1.066	1.011	61.307	1.489	1.657
16	Kab. Blora	2.163	3.110	26.870	1.560	1.872
17	Kab. Rembang	140	1.281	25.435	295	525
18	Kab. Pati	579	3.914	25.319	5.320	1.146
19	Kab. Kudus	1.802	645	29.879	747	1.341
20	Kab. Jepara	1.403	2.431	25.864	1.544	1.980
21	Kab. Demak	1.317	613	47.461	1.291	792
22	Kab. Semarang	1.032	681	23.545	727	824
23	Kab. Temanggung	598	1.531	46.781	531	411
24	Kab. Kendal	659	1.060	60.825	863	661
25	Kab. Batang	479	555	28.652	456	742
26	Kab. Pekalongan	786	481	79.285	368	399
27	Kab. Pemalang	1.559	1.411	49.614	934	1.588
28	Kab. Tegal	834	617	95.284	0	1.226
29	Kab. Brebes	837	788	91.894	0	2.634
30	Kota Magelang	56	60	2.664	52	70
31	Kota Surakarta	437	419	2.155	540	450
32	Kota Salatiga	136	103	2.776	85	211
33	Kota Semarang	2.572	2.164	19.497	1.715	1.321
34	Kota Pekalongan	51	78	11.860	146	100
35	Kota Tegal	185	87	9.416	0	164
	Provinsi Jawa Tengah	36.352	37.028	1.174.665	27.208	34.027

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Demokrasi Perjuangan (PDP)	Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)	Partai Matahari Bangsa (PMB)	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Kab. Cilacap	4.664	475	3.735	0	1.044
2	Kab. Banyumas	4.551	1.047	3.217	0	3.724
3	Kab. Purbalingga	7.496	363	3.870	0	566
4	Kab. Banjarnegara	11.000	329	1.800	0	2.122
5	Kab. Kebumen	5.933	685	1.026	0	852
6	Kab. Purworejo	4.081	233	321	0	614
7	Kab. Wonosobo	5.433	199	1.188	0	360
8	Kab. Magelang	3.628	329	1.142	0	798
9	Kab. Boyolali	1.797	253	1.537	0	673
10	Kab. Klaten	2.419	255	18.072	0	1.454
11	Kab. Sukoharjo	3.179	172	1.820	0	475
12	Kab. Wonogiri	4.175	253	517	0	1.169
13	Kab. Karanganyar	3.618	346	1.826	0	866
14	Kab. Sragen	4.507	260	994	0	2.139
15	Kab. Grobogan	19.102	1.277	531	0	3.076
16	Kab. Blora	3.808	743	395	0	3.684
17	Kab. Rembang	1.266	89	133	0	455
18	Kab. Pati	13.219	816	1.061	0	3.466
19	Kab. Kudus	1.980	985	567	0	4.075
20	Kab. Jepara	1.085	2.956	554	0	834
21	Kab. Demak	8.255	522	272	0	1.284
22	Kab. Semarang	2.525	220	3.224	0	703
23	Kab. Temanggung	1.598	268	466	0	338
24	Kab. Kendal	3.264	1.322	1.169	0	1.972
25	Kab. Batang	3.677	507	626	0	481
26	Kab. Pekalongan	2.248	522	1.600	0	3.218
27	Kab. Pemalang	6.102	311	3.058	0	1.053
28	Kab. Tegal	5.683	191	4.186	0	669
29	Kab. Brebes	6.287	424	4.134	0	5.122
30	Kota Magelang	442	394	201	0	308
31	Kota Surakarta	1.641	163	1.073	0	654
32	Kota Salatiga	663	28	137	0	134
33	Kota Semarang	9.066	605	2.635	0	1.840
34	Kota Pekalongan	693	184	311	0	395
35	Kota Tegal	1.255	92	3.169	0	101
Provinsi Jawa Tengah		160.340	17.518	70.567	0	50.718

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Republika Nusantara (Republikan)	Partai Pelopor	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Damai Sejahtera (PDS)
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	Kab. Cilacap	3.545	763	119.414	40.681	1.248
2	Kab. Banyumas	4.445	585	77.936	28.423	1.121
3	Kab. Purbalingga	3.748	397	50.507	19.103	0
4	Kab. Banjarnegara	1.561	1.485	45.862	59.371	0
5	Kab. Kebumen	1.392	589	57.227	37.094	0
6	Kab. Purworejo	3.121	2.106	59.455	15.899	1.373
7	Kab. Wonosobo	1.026	335	41.141	29.749	1.307
8	Kab. Magelang	2.356	485	38.944	62.908	1.237
9	Kab. Boyolali	1.182	1.865	73.218	9.159	1.286
10	Kab. Klaten	2.011	1.227	71.465	17.276	2.991
11	Kab. Sukoharjo	1.329	406	36.487	10.906	5.027
12	Kab. Wonogiri	1.497	861	84.800	7.210	1.383
13	Kab. Karanganyar	9.128	11.008	62.681	6.628	3.273
14	Kab. Sragen	973	1.879	44.091	7.712	1.524
15	Kab. Grobogan	1.759	3.061	88.266	30.528	2.502
16	Kab. Blora	1.260	5.288	74.609	24.938	1.404
17	Kab. Rembang	663	3.818	37.716	38.444	365
18	Kab. Pati	2.967	11.557	46.487	17.056	2.160
19	Kab. Kudus	873	2.286	31.862	17.920	2.524
20	Kab. Jepara	1.625	553	52.690	77.924	6.343
21	Kab. Demak	4.319	742	41.755	38.170	1.422
22	Kab. Semarang	1.973	499	57.829	42.182	3.214
23	Kab. Temanggung	988	1.302	42.109	35.863	1.916
24	Kab. Kendal	1.062	519	51.410	30.057	1.024
25	Kab. Batang	878	2.359	24.112	25.336	589
26	Kab. Pekalongan	867	306	27.086	20.495	336
27	Kab. Pemasang	2.388	773	74.819	60.558	1.151
28	Kab. Tegal	1.073	965	39.967	26.865	896
29	Kab. Brebes	1.696	938	67.424	45.002	1.140
30	Kota Magelang	236	31	5.734	1.262	1.565
31	Kota Surakarta	824	491	15.820	4.169	12.618
32	Kota Salatiga	243	90	8.101	2.960	3.751
33	Kota Semarang	2.006	1.360	43.562	20.032	17.206
34	Kota Pekalongan	192	69	21.515	15.363	424
35	Kota Tegal	288	498	11.155	2.418	749
Provinsi Jawa Tengah		65.494	61.496	1.727.256	929.661	85.069

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Bintang Reformasi (PBR)	Partai Patriot (PP)
(1)	(2)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
1	Kab. Cilacap	3.990	6.656	241.169	1.654	0
2	Kab. Banyumas	1.035	4.105	215.697	1.300	0
3	Kab. Purbalingga	189	1.663	101.584	1.812	0
4	Kab. Banjarnegara	419	4.221	69.445	2.624	0
5	Kab. Kebumen	901	4.121	151.265	2.004	0
6	Kab. Purworejo	389	9.654	66.214	944	2.490
7	Kab. Wonosobo	287	3.193	68.010	1.067	396
8	Kab. Magelang	285	4.176	116.621	2.764	426
9	Kab. Boyolali	341	7.269	126.350	915	338
10	Kab. Klaten	3.116	4.804	162.187	1.381	345
11	Kab. Sukoharjo	260	6.946	123.668	714	710
12	Kab. Wonogiri	449	2.774	220.388	1.169	289
13	Kab. Karanganyar	381	5.793	81.576	845	1.852
14	Kab. Sragen	1.350	4.899	131.734	866	239
15	Kab. Grobogan	15.878	5.275	110.738	2.445	0
16	Kab. Blora	2.849	7.789	72.396	3.393	0
17	Kab. Rembang	193	8.302	25.482	829	0
18	Kab. Pati	1.002	17.405	125.618	1.199	0
19	Kab. Kudus	268	3.192	47.138	3.502	235
20	Kab. Jepara	655	2.716	70.102	867	1.300
21	Kab. Demak	2.146	3.152	52.961	2.447	279
22	Kab. Semarang	294	1.999	89.313	2.939	0
23	Kab. Temanggung	298	1.736	60.887	990	514
24	Kab. Kendal	332	1.533	59.875	1.080	0
25	Kab. Batang	211	1.118	95.436	1.246	0
26	Kab. Pekalongan	200	3.185	72.064	500	0
27	Kab. Pemasang	579	2.142	111.082	967	0
28	Kab. Tegal	562	4.079	128.704	3.034	0
29	Kab. Brebes	844	3.036	175.138	1.144	0
30	Kota Magelang	42	168	11.466	191	193
31	Kota Surakarta	267	2.287	87.195	547	316
32	Kota Salatiga	43	209	12.500	134	0
33	Kota Semarang	1.246	6.780	113.760	1.181	0
34	Kota Pekalongan	55	936	13.152	110	0
35	Kota Tegal	73	544	27.391	114	0
Provinsi Jawa Tengah		41.429	147.857	3.438.306	48.918	9.922

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Demokrat (PD)	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	Partai Merdeka
(1)	(2)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
1	Kab. Cilacap	136.715	894	1.273	13.379	343
2	Kab. Banyumas	136.651	1.630	704	10.922	383
3	Kab. Purbalingga	54.883	381	586	4.310	0
4	Kab. Banjarnegara	49.819	426	288	7.604	0
5	Kab. Kebumen	97.031	626	415	25.070	0
6	Kab. Purworejo	75.618	439	346	5.104	162
7	Kab. Wonosobo	44.073	288	368	12.404	172
8	Kab. Magelang	94.912	851	560	31.984	251
9	Kab. Boyolali	53.856	529	3.711	2.633	294
10	Kab. Klaten	84.172	776	952	3.351	252
11	Kab. Sukoharjo	53.891	510	222	660	170
12	Kab. Wonogiri	58.318	358	1.210	565	182
13	Kab. Karanganyar	58.245	487	2.748	7.31	194
14	Kab. Sragen	53.020	245	2.230	5.374	200
15	Kab. Grobogan	89.747	524	844	10.171	476
16	Kab. Blora	59.246	394	351	2.800	243
17	Kab. Rembang	53.053	205	656	5.910	96
18	Kab. Pati	90.497	1.035	484	9.016	447
19	Kab. Kudus	46.296	156	1.168	7.175	128
20	Kab. Jepara	54.342	318	792	11.855	270
21	Kab. Demak	74.946	317	471	11.747	624
22	Kab. Semarang	67.689	879	452	7.668	325
23	Kab. Temanggung	54.891	313	549	16.474	150
24	Kab. Kendal	72.720	429	394	8.310	270
25	Kab. Batang	40.690	171	819	2.374	104
26	Kab. Pekalongan	22.953	127	381	11.254	436
27	Kab. Pemalang	51.072	346	504	12.018	615
28	Kab. Tegal	74.821	327	0	12.055	283
29	Kab. Brebes	102.699	535	0	10.205	441
30	Kota Magelang	17.593	111	98	723	23
31	Kota Surakarta	47.386	2.242	421	561	214
32	Kota Salatiga	17.965	265	1.533	553	36
33	Kota Semarang	235.857	4.229	1.169	5.823	777
34	Kota Pekalongan	10.292	65	147	3.076	31
35	Kota Tegal	19.661	51	0	668	38
Provinsi Jawa Tengah		2.355.620	21.479	26.846	274.527	8.630

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik			Total Suara Sah
		Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)	PARTAI Sarikat Indonesia	Partai Buruh	
(1)	(2)	(38)	(39)	(40)	(41)
1	Kab. Cilacap	0	0	1.410	837.760
2	Kab. Banyumas	0	0	945	761.564
3	Kab. Purbalingga	0	0	0	372.538
4	Kab. Banjarnegara	0	0	0	425.824
5	Kab. Kebumen	0	0	0	550.596
6	Kab. Purworejo	348	0	365	362.301
7	Kab. Wonosobo	421	0	343	361.731
8	Kab. Magelang	770	0	1.087	615.348
9	Kab. Boyolali	0	0	603	461.969
10	Kab. Klaten	0	0	505	593.710
11	Kab. Sukoharjo	0	0	510	370.750
12	Kab. Wonogiri	0	0	558	532.029
13	Kab. Karanganyar		0	741	397.344
14	Kab. Sragen	0	0	439	393.122
15	Kab. Grobogan	603	0	375	599.112
16	Kab. Blora	175	0	220	404.464
17	Kab. Rembang	112	0	122	255.057
18	Kab. Pati	1.147	0	459	531.510
19	Kab. Kudus	511	0	246	306.868
20	Kab. Jepara	829	0	430	465.716
21	Kab. Demak	680	0	414	410.461
22	Kab. Semarang	352	213	666	444.134
23	Kab. Temanggung	398	0	733	379.171
24	Kab. Kendal	399	184	473	412.160
25	Kab. Batang	245	0	964	320.443
26	Kab. Pekalongan	361	0	252	336.471
27	Kab. Pemalang	461	0	371	528.376
28	Kab. Tegal	0	0	3.549	548.280
29	Kab. Brebes	0	0	423	713.299
30	Kota Magelang	27	0	76	57.935
31	Kota Surakarta	0	0	551	244.005
32	Kota Salatiga	60	29	130	77.441
33	Kota Semarang	1.382	770	1.892	671.159
34	Kota Pekalongan	73	0	85	113.164
35	Kota Tegal	0	0	85	106.248
Provinsi Jawa Tengah		9.354	1.196	20.022	14.962.060

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 8. Perolehan Suara Sah Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Legislatif 2009 menurut Kabupaten/Kota dan Partai Politik

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	23.722	24.043	0	12.220	40.684
2	Kab. Banyumas	23.754	12.029	912	12.317	35.935
3	Kab. Purbalingga	8.086	3.115	0	4.643	10.770
4	Kab. Banjarnegara	9.143	2.576	0	4.547	16.369
5	Kab. Kebumen	9.194	15.206	12	7.657	24.056
6	Kab. Purworejo	5.915	4.202	0	7.514	17.470
7	Kab. Wonosobo	15.923	3.212	0	4.010	15.925
8	Kab. Magelang	15.544	4.090	0	8.790	43.790
9	Kab. Boyolali	23.805	13.293	0	6.141	14.190
10	Kab. Klaten	29.732	9.120	0	4.498	22.530
11	Kab. Sukoharjo	11.497	0	0	2.200	7.797
12	Kab. Wonogiri	13.486	7.272	0	5.073	17.509
13	Kab. Karanganyar	11.322	19.910	0	4.542	11.991
14	Kab. Sragen	11.255	6.657	0	16.026	11.280
15	Kab. Grobogan	31.579	12.242	3.041	5.139	39.390
16	Kab. Blora	26.088	0	0	6.187	15.395
17	Kab. Rembang	7.294	5.700	0	4.262	9.017
18	Kab. Pati	21.179	18.565	0	3.940	27.790
19	Kab. Kudus	13.557	15.033	6.383	3.359	16.139
20	Kab. Jepara	24.818	12.341	0	4.230	53.125
21	Kab. Demak	16.306	13.908	0	5.955	21.341
22	Kab. Semarang	25.999	4.642	1.627	6.185	28.279
23	Kab. Temanggung	23.920	2.061	0	3.559	19.005
24	Kab. Kendal	25.647	7.591	482	3.737	17.290
25	Kab. Batang	22.968	10.689	0	6.609	17.144
26	Kab. Pekalongan	16.541	8.834	0	4.289	11.210
27	Kab. Pemasang	20.627	7.801	0	8.086	26.712
28	Kab. Tegal	18.578	12.373	2.646	7.241	21.642
29	Kab. Brebes	27.824	2.566	0	16.210	30.955
30	Kota Magelang	823	0	0	926	1.388
31	Kota Surakarta	10.578	1.189	0	1.117	8.065
32	Kota Salatiga	4.791	1.552	0	2.872	3.222
33	Kota Semarang	19.734	6.041	2584	3.961	38.199
34	Kota Pekalongan	3.242	360	0	1.021	4.822
35	Kota Tegal	6.051	1.763	607	2.398	3.328
Jumlah		580.522	269.976	18.294	201.461	703.754

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 8. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Barisan Nasional (BARNAS)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kab. Cilacap	5.685	0	42.938	79.295	0
2	Kab. Banyumas	444	531	49.408	80.942	0
3	Kab. Purbalingga	2.813	1.300	33.777	35.279	0
4	Kab. Banjarnegara	2.369	0	34.849	60.884	0
5	Kab. Kebumen	4.806	3.716	29.569	46.578	0
6	Kab. Purworejo	1.023	0	20.043	18.726	92
7	Kab. Wonosobo	2.213	1.981	13.359	46.150	0
8	Kab. Magelang	1.766	0	37.796	58.589	0
9	Kab. Boyolali	651	0	38.893	64.347	0
10	Kab. Klaten	2.945	345	49.941	57.951	0
11	Kab. Sukoharjo	921	3.031	29.940	39.556	0
12	Kab. Wonogiri	1.486	0	51.209	36.454	0
13	Kab. Karanganyar	663	11.968	35.693	39.147	0
14	Kab. Sragen	533	396	31.027	27.257	0
15	Kab. Grobogan	1.026	5.893	26.573	28.061	0
16	Kab. Blora	2.328	7.858	18.835	14.629	15.165
17	Kab. Rembang	2.139	0	15.945	19.716	7
18	Kab. Pati	12.439	4.926	36.930	18.239	0
19	Kab. Kudus	7.038	0	14.565	36.254	3.607
20	Kab. Jepara	16.396	4.860	18.970	27.175	0
21	Kab. Demak	2.488	2.721	39.147	16.315	294
22	Kab. Semarang	1.424	15.215	37.159	39.628	0
23	Kab. Temanggung	1.284	3.481	21.451	50.345	0
24	Kab. Kendal	927	264	29.108	42.114	0
25	Kab. Batang	3.369	0	11.333	20.983	0
26	Kab. Pekalongan	4.171	150	11.078	46.001	0
27	Kab. Pemalang	6.848	2.296	39.960	51.018	0
28	Kab. Tegal	1.079	961	48.136	43.317	0
29	Kab. Brebes	5.177	0	47.274	56.044	0
30	Kota Magelang	578	1.393	4.651	5.378	0
31	Kota Surakarta	800	2.357	23.719	16.923	0
32	Kota Salatiga	360	7.595	10.709	7.250	0
33	Kota Semarang	3.880	7.193	66.248	48.978	0
34	Kota Pekalongan	101	174	6.307	20.694	0
35	Kota Tegal	1.552	200	6.858	9.798	1.284
	Jumlah	103.722	90.805	1.033.398	1.310.015	20.449

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 8. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Keadaulatan (PK)	Partai Persatuan Daerah (PPD)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Kab. Cilacap	1.477	1.169	35.653	924	1.350
2	Kab. Banyumas	4.328	401	68.869	3.345	1.371
3	Kab. Purbalingga	0	153	34.183	958	499
4	Kab. Banjarnegara	210	316	43.232	0	0
5	Kab. Kebumen	281	20	31.990	445	5
6	Kab. Purworejo	0	1.049	35.162	3.272	283
7	Kab. Wonosobo	0	0	61.744	363	0
8	Kab. Magelang	0	1.084	80.005	0	0
9	Kab. Boyolali	1.106	312	28.117	148	978
10	Kab. Klaten	851	256	17.825	151	1.642
11	Kab. Sukoharjo	0	1.613	13.914	546	435
12	Kab. Wonogiri	0	305	5.086	197	1.923
13	Kab. Karanganyar	2.038	4.490	21.807	1.530	449
14	Kab. Sragen	408	0	35.557	792	0
15	Kab. Grobogan	1.073	0	90.689	0	0
16	Kab. Blora	4.213	3.371	33.752	1.851	2.307
17	Kab. Rembang	0	2.817	37.784	143	659
18	Kab. Pati	0	9.593	37.229	19.866	831
19	Kab. Kudus	3.374	1.323	52.565	1.491	2.639
20	Kab. Jepara	450	4.441	37.196	1.506	3.942
21	Kab. Demak	1.278	741	100.826	1.366	563
22	Kab. Semarang	0	0	35.270	0	818
23	Kab. Temanggung	0	2.147	41.330	0	153
24	Kab. Kendal	0	700	63.777	436	284
25	Kab. Batang	406	576	37.608	0	981
26	Kab. Pekalongan	839	150	98.682	15	0
27	Kab. Pemasang	1.966	875	66.978	0	1.197
28	Kab. Tegal	504	226	108.961	0	812
29	Kab. Brebes	0	0	101.887	0	1.808
30	Kota Magelang	0	67	4.498	0	58
31	Kota Surakarta	388	249	2.893	1.329	108
32	Kota Salatiga	25	42	4.383	78	110
33	Kota Semarang	3.192	1.449	25.063	1.290	1.713
34	Kota Pekalongan	14	100	15.400	123	100
35	Kota Tegal	463	111	12.382	38	118
Jumlah		29.104	40.146	1.522.297	42.203	28.136

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 8. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)	Partai Matahari Bangsa (PMB)	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
(1)	(2)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Kab. Cilacap	4.872	301	4.249	0	95
2	Kab. Banyumas	4.974	2.118	5.056	505	7.684
3	Kab. Purbalingga	11.722	0	5.367	0	86
4	Kab. Banjarnegara	15.078	0	3.533	0	4.302
5	Kab. Kebumen	6.096	324	716	3	0
6	Kab. Purworejo	7.007	0	0	0	598
7	Kab. Wonosobo	10.055	0	1.887	0	0
8	Kab. Magelang	3.517	179	1.164	0	1.170
9	Kab. Boyolali	2.827	74	406	573	438
10	Kab. Klaten	3.580	323	11.374	795	2.381
11	Kab. Sukoharjo	4.752	0	0	0	140
12	Kab. Wonogiri	5.189	0	240	0	692
13	Kab. Karanganyar	3.445	285	1.383	138	646
14	Kab. Sragen	4.933	0	1.067	5.076	1.149
15	Kab. Grobogan	25.462	1.655	0	0	5.333
16	Kab. Blora	5.999	175	247	5.692	4.562
17	Kab. Rembang	1.780	27	0	0	181
18	Kab. Pati	26.321	1.926	690	837	3.520
19	Kab. Kudus	4.800	1.126	1.201	510	12.764
20	Kab. Jepara	911	5.437	648	269	707
21	Kab. Demak	19.635	1.053	265	0	1.309
22	Kab. Semarang	3.319	0	1.377	0	515
23	Kab. Temanggung	1.644	140	707	786	0
24	Kab. Kendal	5.315	4.476	1.466	405	3.069
25	Kab. Batang	7.377	166	158	0	213
26	Kab. Pekalongan	1.688	473	1.733	0	1.627
27	Kab. Pemalang	6.538	0	3100	0	697
28	Kab. Tegal	7.895	0	2.570	473	322
29	Kab. Brebes	8.575	231	6.558	0	9.700
30	Kota Magelang	430	867	624	80	678
31	Kota Surakarta	3.096	172	451	1.656	1.076
32	Kota Salatiga	1.479	0	233	50	83
33	Kota Semarang	11.167	1.066	2.698	2.011	2.734
34	Kota Pekalongan	1.276	207	320	0	1.005
35	Kota Tegal	2.243	232	3.546	0	60
Jumlah		234.997	23.033	65.034	19.859	69.536

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 8. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Republika Nusantara (RepublikaN)	Partai Pelopor	Partai Golongan Karya (Golkar)	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Damai Sejahtera (PDS)
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	Kab. Cilacap	3.708	0	129.697	47.538	0
2	Kab. Banyumas	2.510	0	83.028	29.765	628
3	Kab. Purbalingga	4.380	0	62.368	19.547	0
4	Kab. Banjarnegara	858	2.983	48.953	54.076	0
5	Kab. Kebumen	6	3	60.186	37.433	2
6	Kab. Purworejo	3.377	4.025	76.291	13.802	1.124
7	Kab. Wonosobo	329	0	43.942	37.117	878
8	Kab. Magelang	2.217	0	43.537	71.785	0
9	Kab. Boyolali	451	0	85.775	10.845	0
10	Kab. Klaten	671	2.549	132.113	27.723	1.220
11	Kab. Sukoharjo	750	252	52.016	18.274	3.562
12	Kab. Wonogiri	0	100	126.249	11.995	561
13	Kab. Karanganyar	17.920	14.084	83.027	9.350	1.967
14	Kab. Sragen	243	2.690	59.746	10.110	570
15	Kab. Grobogan	411	3.089	106.485	32.927	1.913
16	Kab. Blora	0	8.984	77.114	29.765	505
17	Kab. Rembang	354	8.937	45.369	46.264	0
18	Kab. Pati	2.462	21.015	56.569	23.904	0
19	Kab. Kudus	408	6.951	54.599	21.151	2.155
20	Kab. Jepara	814	400	52.545	81.465	7.915
21	Kab. Demak	4.296	1.235	71.128	39.772	598
22	Kab. Semarang	2.446	0	56.487	53.330	1.968
23	Kab. Temanggung	287	1.948	54.177	41.578	1.013
24	Kab. Kendal	877	517	81.927	34.722	0
25	Kab. Batang	542	3.739	28.470	28.403	0
26	Kab. Pekalongan	406	192	41.926	30.370	0
27	Kab. Pemasang	2.414	1.085	97.506	65.597	627
28	Kab. Tegal	0	56	57.712	31288	0
29	Kab. Brebes	836	0	96.468	50.038	0
30	Kota Magelang	485	0	7.565	1.612	1.962
31	Kota Surakarta	549	130	20.698	6.183	11.635
32	Kota Salatiga	333	61	8.886	3.257	2.150
33	Kota Semarang	2.283	1.763	61.764	23.221	17.336
34	Kota Pekalongan	176	73	35.542	14.427	0
35	Kota Tegal	246	116	17.484	2.456	736
Jumlah		58.045	86.977	2.220.349	1.061.090	61.025

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 8. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Partai Bintang Reformasi (PBR)	Partai Patriot (PP)
(1)	(2)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
1	Kab. Cilacap	7.580	5.304	231.656	1.268	277
2	Kab. Banyumas	1.737	3.740	205.227	788	0
3	Kab. Purbalingga	0	1.499	116.328	2.788	0
4	Kab. Banjarnegara	0	3.659	60.551	6.283	435
5	Kab. Kebumen	854	4.586	168.178	2.348	3
6	Kab. Purworejo	159	14.036	66.804	0	3.599
7	Kab. Wonosobo	0	4.429	85.765	704	443
8	Kab. Magelang	0	6.113	145.300	1.769	321
9	Kab. Boyolali	548	10.825	143.105	613	0
10	Kab. Klaten	7.172	2.737	189.200	1.300	0
11	Kab. Sukoharjo	0	7.458	166.840	833	2.461
12	Kab. Wonogiri	261	2.133	209.954	1.955	161
13	Kab. Karanganyar	204	4.514	88.849	1.376	4.494
14	Kab. Sragen	2.767	2.371	170.952	961	79
15	Kab. Grobogan	28.179	5.861	126.993	3.250	416
16	Kab. Blora	5.975	10.595	85.687	4.380	97
17	Kab. Rembang	238	14.802	30.077	1.964	2.458
18	Kab. Pati	1.830	19.219	141.547	1.848	209
19	Kab. Kudus	54	7.496	49.434	8.799	50
20	Kab. Jepara	1.336	5.322	86.303	815	3.211
21	Kab. Demak	3.208	5.532	70.687	2.193	342
22	Kab. Semarang	243	2.143	99.800	4.609	0
23	Kab. Temanggung	121	1.337	64.233	705	771
24	Kab. Kendal	171	938	73.530	454	0
25	Kab. Batang	0	577	118.205	1.556	0
26	Kab. Pekalongan	41	5.039	83.789	330	497
27	Kab. Pemasang	774	0	113.684	0	5.966
28	Kab. Tegal	174	5.748	143.817	6.237	167
29	Kab. Brebes	435	1.295	186.163	177	0
30	Kota Magelang	0	0	13.591	385	563
31	Kota Surakarta	337	2.473	91.626	657	215
32	Kota Salatiga	14	131	15.747	62	0
33	Kota Semarang	1.794	8.447	115.172	1.727	4.730
34	Kota Pekalongan	77	1.815	19.020	64	0
35	Kota Tegal	0	455	27.491	37	0
Jumlah		66.283	172.629	3.805.305	63.235	31.965

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 8. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik				
		Partai Demokrat (PD)	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	Partai Merdeka
(1)	(2)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
1	Kab. Cilacap	121.147	549	2.433	11.701	0
2	Kab. Banyumas	121.154	3.406	988	19.819	339
3	Kab. Purbalingga	52.725	0	0	5.947	0
4	Kab. Banjarnegara	44.749	0	0	8.584	0
5	Kab. Kebumen	86.882	2	1	29.592	5
6	Kab. Purworejo	61.014	0	0	6.718	58
7	Kab. Wonosobo	35.908	0	0	18.477	0
8	Kab. Magelang	80.000	915	0	42.686	89
9	Kab. Boyolali	57.378	279	7.732	4.873	0
10	Kab. Klaten	70.431	133	1.493	5.506	0
11	Kab. Sukoharjo	40.813	0	63	0	0
12	Kab. Wonogiri	44.491	0	1.319	331	0
13	Kab. Karanganyar	49.160	0	2.852	261	0
14	Kab. Sragen	46.942	0	3.507	6.665	0
15	Kab. Grobogan	57.786	0	1.187	12.325	607
16	Kab. Blora	58.961	0	76	3.965	0
17	Kab. Rembang	69.330	0	1.159	12.956	0
18	Kab. Pati	95.590	2.969	420	17.465	388
19	Kab. Kudus	34.019	0	3.978	17.996	28
20	Kab. Jepara	34.294	0	1.692	23.524	381
21	Kab. Demak	47.297	100	347	12.653	664
22	Kab. Semarang	58.361	912	0	8.086	0
23	Kab. Temanggung	44.202	0	554	25.152	0
24	Kab. Kendal	51.215	101	147	12.096	0
25	Kab. Batang	42.570	0	208	3.768	0
26	Kab. Pekalongan	14.954	0	0	15.782	114
27	Kab. Pemalang	35.763	0	0	13.891	225
28	Kab. Tegal	58.683	0	789	14.308	0
29	Kab. Brebes	87.225	0	0	10.818	268
30	Kota Magelang	15.001	60	191	1.094	0
31	Kota Surakarta	39.216	2.329	847	959	0
32	Kota Salatiga	10.842	90	5.637	619	0
33	Kota Semarang	196.766	5.385	1.414	11.139	620
34	Kota Pekalongan	5.901	0	276	5.564	0
35	Kota Tegal	18.672	0	0	550	51
Jumlah		1.989.442	17.230	39.310	385.870	3.837

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 8. (lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Partai Politik			Total Suara Sah
		Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)	Partai Sarikat Indonesia	Partai Buruh	
(1)	(2)	(38)	(39)	(40)	(41)
1	Kab. Cilacap	0	0	2.483	844.018
2	Kab. Banyumas	107	0	643	791.802
3	Kab. Purbalingga	0	0	0	418.333
4	Kab. Banjarnegara	0	0	0	428.539
5	Kab. Kebumen	4	0	2	570.762
6	Kab. Purworejo	0	0	0	373.363
7	Kab. Wonosobo	150	0	154	405.118
8	Kab. Magelang	0	0	752	652.968
9	Kab. Boyolali	0	0	525	519.248
10	Kab. Klaten	0	0	396	658.884
11	Kab. Sukoharjo	0	0	531	410.195
12	Kab. Wonogiri	0	0	365	545.996
13	Kab. Karanganyar	0	0	296	449.801
14	Kab. Sragen	0	0	135	461.151
15	Kab. Grobogan	1100	85	0	659.770
16	Kab. Blora	0	48	0	454.806
17	Kab. Rembang	0	12	11	341.402
18	Kab. Pati	3.265	0	47	633.568
19	Kab. Kudus	0	214	126	405.186
20	Kab. Jepara	115	0	142	517.696
21	Kab. Demak	0	0	0	505.563
22	Kab. Semarang	0	0	0	489.842
23	Kab. Temanggung	0	0	1399	409.490
24	Kab. Kendal	126	0	111	464.020
25	Kab. Batang	0	0	0	368.618
26	Kab. Pekalongan	0	0	0	400.921
27	Kab. Pemalang	0	0	0	582.231
28	Kab. Tegal	634	0	11.003	608.352
29	Kab. Brebes	0	0	0	748.532
30	Kota Magelang	0	0	0	64.948
31	Kota Surakarta	0	0	487	254.507
32	Kota Salatiga	0	0	0	92.883
33	Kota Semarang	593	1.104	1517	705.976
34	Kota Pekalongan	0	0	0	138.201
35	Kota Tegal	0	0	0	121.326
Jumlah		6.094	1.464	21.125	16.498.016

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 9. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin, Hasil Pemilu Legislatif 2009

No	Asal Partai Politik	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	15	8	23
2	Partai Demokrat	13	3	16
3	Partai Golongan Karya	8	3	11
4	Partai Keadilan Sejahtera (Golkar)	10	0	10
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	9	1	10
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9	0	9
7	Partai GERINDA	8	1	9
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	7	0	7
9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	3	4
10	PKNU	1	0	1
Jumlah		81	19	100

Sumber: Sekretariat DPRD

**Tabel 10. Waktu Pelaksanaan Pilkada Terakhir
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2007 - 2011**

No	Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan	
		Gubernur	Bupati/Walikota
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Cilacap		09 September 2007
2	Kab. Banyumas		10 Februari 2008
3	Kab. Purbalingga		18 April 2010
4	Kab. Banjarnegara		24 Juli 2011
5	Kab. Kebumen		11 April 2010
6	Kab. Purworejo		31 Juli 2010
7	Kab. Wonosobo		02 Agustus 2010
8	Kab. Magelang		26 Oktober 2008
9	Kab. Boyolali		09 Mei 2010
10	Kab. Klaten		20 September 2010
11	Kab. Sukoharjo		03 Juni 2010
12	Kab. Wonogiri		16 September 2010
13	Kab. Karanganyar		26 Oktober 2008
14	Kab. Sragen		19 Maret 2011
15	Kab. Grobogan		9 Januari 2011
16	Kab. Blora		03 Juni 2010
17	Kab. Rembang		26 April 2010
18	Kab. Pati		23 Juli 2011
19	Kab. Kudus		12 April 2008
20	Kab. Jepara		04 Februari 2007
21	Kab. Demak		6 Maret 2011
22	Kab. Semarang		31 Juli 2010
23	Kab. Temanggung		20 Juni 2008
24	Kab. Kendal		06 Juni 2010
25	Kab. Batang		11 Desember 2011
26	Kab. Pekalongan		1 Mei 2011
27	Kab. Pemasang		31 Oktober 2010
28	Kab. Tegal		26 Oktober 2008
29	Kab. Brebes		04 November 2007
30	Kota Magelang		06 Juni 2010
31	Kota Surakarta		26 April 2010
32	Kota Salatiga		08 Mei 2011
33	Kota Semarang		18 April 2010
34	Kota Pekalongan		16 Juni 2010
35	Kota Tegal		26 Oktober 2008
Provinsi Jawa Tengah		22 Juni 2008	

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 11. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih
dalam Pilkada Gubernur Tahun 2008**

No	Kabupaten/Kota	Pilkada Gubernur		
		Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Cilacap	1.346.146	799.497	59,39
2	Kab. Banyumas	1.255.683	757.393	60,32
3	Kab. Purbalingga	668.502	426.892	63,86
4	Kab. Banjarnegara	711.655	442.335	62,16
5	Kab. Kebumen	941.921	619.727	65,79
6	Kab. Purworejo	613.843	383.426	62,46
7	Kab. Wonosobo	600.660	422.594	70,35
8	Kab. Magelang	907.967	666.767	73,44
9	Kab. Boyolali	771.291	458.221	59,41
10	Kab. Klaten	1.010.127	625.700	61,94
11	Kab. Sukoharjo	651.082	402.363	61,80
12	Kab. Wonogiri	900.102	550.876	61,20
13	Kab. Karanganyar	655.849	421.900	64,33
14	Kab. Sragen	715.044	447.377	62,57
15	Kab. Grobogan	1.034.825	525.061	50,74
16	Kab. Blora	676.393	417.591	61,74
17	Kab. Rembang	454.277	274.596	60,45
18	Kab. Pati	993.239	457.098	46,02
19	Kab. Kudus	575.665	183.059	31,80
20	Kab. Jepara	799.696	350.229	43,80
21	Kab. Demak	776.075	341.547	44,01
22	Kab. Semarang	704.993	438.061	62,14
23	Kab. Temanggung	554.971	449.865	81,06
24	Kab. Kendal	721.017	426.182	59,11
25	Kab. Batang	545.737	337.076	61,77
26	Kab. Pekalongan	649.231	351.765	54,18
27	Kab. Pemalang	1.048.597	558.465	53,26
28	Kab. Tegal	1.114.336	610.291	54,77
29	Kab. Brebes	1.383.467	678.465	49,04
30	Kota Magelang	93.199	64.502	69,21
31	Kota Surakarta	383.871	238.420	62,11
32	Kota Salatiga	121.955	82.453	67,61
33	Kota Semarang	1.084.694	681.730	62,85
34	Kota Pekalongan	201.456	106.992	53,11
35	Kota Tegal	187.976	117.874	62,71
Provinsi Jawa Tengah		25.855.542	15.116.390	58,46

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 12. Jumlah Pemilih, Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pilkada Gubernur Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008

No	Kabupaten/Kota	Pilkada Gubernur			
		Jumlah Pemilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	1.346.146	766.832	32.665	546.276
2	Kab. Banyumas	1.255.683	713.649	43.744	498.290
3	Kab. Purbalingga	668.502	396.964	29.928	241.610
4	Kab. Banjarnegara	711.655	406.083	36.252	269.320
5	Kab. Kebumen	941.921	599.212	20.515	322.194
6	Kab. Purworejo	613.843	362.514	20.912	230.417
7	Kab. Wonosobo	600.660	359.675	62.919	178.066
8	Kab. Magelang	907.967	612.541	54.226	241.200
9	Kab. Boyolali	771.291	430.211	28.010	313.070
10	Kab. Klaten	1.010.127	580.936	44.764	384.427
11	Kab. Sukoharjo	651.082	372.539	29.824	248.719
12	Kab. Wonogiri	900.102	533.582	17.294	349.226
13	Kab. Karanganyar	655.849	393.534	28.366	233.949
14	Kab. Sragen	715.044	432.739	14.638	267.667
15	Kab. Grobogan	1.034.825	501.323	23.738	509.764
16	Kab. Blora	676.393	393.594	23.997	258.802
17	Kab. Rembang	454.277	254.543	20.053	179.681
18	Kab. Pati	993.239	433.110	23.988	536.141
19	Kab. Kudus	575.665	172.347	10.712	392.606
20	Kab. Jepara	799.696	331.586	18.643	449.467
21	Kab. Demak	776.075	313.129	28.418	434.528
22	Kab. Semarang	704.993	393.513	44.548	266.932
23	Kab. Temanggung	554.971	403.988	45.877	105.106
24	Kab. Kendal	721.017	364.597	61.585	294.835
25	Kab. Batang	545.737	298.705	38.371	208.661
26	Kab. Pekalongan	649.231	319.623	32.142	297.466
27	Kab. Pemasang	1.048.597	514.511	43.954	490.132
28	Kab. Tegal	1.114.336	560.248	50.043	504.045
29	Kab. Brebes	1.383.467	652.882	25.583	705.002
30	Kota Magelang	93.199	54.855	9.647	28.697
31	Kota Surakarta	383.871	212.176	26.244	145.451
32	Kota Salatiga	121.955	70.035	12.418	39.502
33	Kota Semarang	1.084.694	602.803	78.927	402.964
34	Kota Pekalongan	201.456	89.031	17.961	94.464
35	Kota Tegal	187.976	109.432	8.442	70.102
Provinsi Jawa Tengah		25.855.542	14.007.042	1.109.348	10.739.152

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 13. Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada Bupati/Walikota Tahun 2005-2008 dan Tahun 2010-2011

No	Kabupaten/Kota	2005 - 2008		2010 - 2011	
		Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih	Terdaftar	Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	1.311.331	895.109		
2	Kab. Banyumas	1.245.896	909.062		
3	Kab. Purbalingga	620.981	449.300	689.384	460.041
4	Kab. Banjarnegara	698.430	509.625	745.569	515.975
5	Kab. Kebumen (i)	856.625	615.175	973.723	614.966
	Putaran II			973.723	556.692
6	Kab. Purworejo (I)	547.135	410.090	633.806	398.489
	Putaran II			633.806	372.679
7	Kab. Wonosobo	561.732	444.914	624.996	453.522
8	Kab. Magelang	902.404	654.098		
9	Kab. Boyolali	706.176	538.093	769.994	559.861
10	Kab. Klaten	881.657	657.058	1.015.775	673.748
11	Kab. Sukoharjo	599.259	434.172	657.774	433.020
12	Kab. Wonogiri	826.621	570.068	915.178	600.065
13	Kab. Karanganyar	658.531	454.023		
14	Kab. Sragen	676.502	484.587	751.071	533.980
15	Kab. Grobogan	981.802	686.451	1.076.639	728.350
16	Kab. Blora	624.739	463.873	688.244	493.478
17	Kab. Rembang	425.746	350.891	458.795	345.602
18	Kab. Pati	952.200	493.083	1.019.280	733.742
19	Kab. Kudus	572.671	323.213		
20	Kab. Jepara	779.630	429.335		
21	Kab. Demak	740.939	575.271	805.661	522.236
22	Kab. Semarang	663.443	444.415	735.418	489.405
23	Kab. Temanggung	555.755	449.748		
24	Kab. Kendal	650.278	477.147	732.017	515.070
25	Kab. Batang	522.382	405.694	569.723	437.318
26	Kab. Pekalongan	611.614	452.700	683.859	465.262
27	Kab. Pemasang	955.269	620.381	1.052.133	595.739
28	Kab. Tegal	1.124.230	643.041		
29	Kab. Brebes	1.361.954	803.109		
30	Kota Magelang	86.403	67.036	94.850	67.370
31	Kota Surakarta	376.497	282.023	393.703	282.689
32	Kota Salatiga	121.573	93.099	124.309	102.003
33	Kota Semarang	999.693	664.897	1.100.337	660.851
34	Kota Pekalongan	190.130	129.200	209.935	147.034
35	Kota Tegal	196.976	129.621		

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 14. Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pilkada Bupati/Walikota Tahun 2007-2011

No	Kabupaten/Kota	Pilkada Bupati/Walikota			
		Jumlah Pemilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	1.311.331	873.292	21.817	416.222
2	Kab. Banyumas	1.245.896	883.503	25.559	336.834
3	Kab. Purbalingga	689.384	383.443	51.710	254.231
4	Kab. Banjarnegara	745.569	494.629	14.996	188.805
5	Kab. Kebumen (Putaran I)	973.723	592.168	22.789	358.766
	(Putaran II)	973.723	535.817	20.875	414.031
6	Kab. Purworejo (Putaran I)	633.806	375.506	22.983	235.317
	(Putaran II)	633.806	347.656	25.023	261.127
7	Kab. Wonosobo	624.996	412.376	41.146	171.474
8	Kab. Magelang	902.404	612.794	41.304	248.306
9	Kab. Boyolali	769.994	540.192	19.669	210.133
10	Kab. Klaten	1.015.775	618.245	55.503	342.085
11	Kab. Sukoharjo	657.774	404.618	28.402	224.754
12	Kab. Wonogiri	915.178	586.288	13.777	315.113
13	Kab. Karanganyar	658.531	439.372	14.651	203.480
14	Kab. Sragen	751.071	452.883	31.704	191.915
15	Kab. Grobogan	1.076.639	664.599	21.852	295.351
16	Kab. Blora	688.244	480.437	13.041	194.766
17	Kab. Rembang	458.795	334.345	11.257	113.193
18	Kab. Pati	1.019.280	421.148	71.935	459.117
19	Kab. Kudus	572.671	304.855	18.685	248.805
20	Kab. Jepara	779.630	405.908	23.427	350.295
21	Kab. Demak	805.661	559.273	15.998	165.668
22	Kab. Semarang	735.418	459.018	30.387	246.013
23	Kab. Temanggung	555.755	414.001	35.747	105.284
24	Kab. Kendal	732.017	479.195	35.875	216.947
25	Kab. Batang	569.723	423.530	13.788	132.405
26	Kab. Pekalongan	683.859	434.703	17.997	158.914
27	Kab. Pemasang	1.052.133	567.935	27.804	456.394
28	Kab. Tegal	1.124.230	613.562	29.479	481.189
29	Kab. Brebes	1.361.954	768.833	34.276	558.845
30	Kota Magelang	94.850	62.419	4.951	26.480
31	Kota Surakarta	393.703	275.549	7.140	111.014
32	Kota Salatiga	124.309	87.317	5.782	28.474
33	Kota Semarang	1.100.337	616.480	44.371	439.486
34	Kota Pekalongan	209.935	139.332	7.702	62.901
35	Kota Tegal	196.976	124.481	5.140	66.083

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 15. Perolehan Suara Kepala Daerah dan Partai Pengusungnya ,2007-2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kandidat	Perolehan Suara Sah		Partai Pendukung
			Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Cilacap	2	446.703	51,14	PDIP
2	Kab. Banyumas	4	321.106	36,34	PKB
3	Kab. Purbalingga	3	235.158	57,59	PDIP; PAN; PKS; PKB
4	Kab. Banjarnegara	4	199.065	40,02	P. Golkar, PDIP, PPP, PKS, P. Gerindra, PKNU, P. Hanura, PBR, PPRN, P. Barnas
5	Kab. Kebumen (I)	4	174.163	29,41	PAN;PPP;PKNU;Gerindra
	Putaran II	2	272.779	50,91	PAN;PPP;PKNU;Gerindra
6	Kab. Purworejo (I)	9	71.039	18,92	PAN; PPP; PPI; P.Pelopor
	Putaran II	2	185.847	53,46	P. GOLKAR
7	Kab. Wonosobo	5	221.698	51,34	PKB; P. GOLKAR; PPP
8	Kab. Magelang	2	514.890	84,02	PDIP; PKB; PAN; P.Demokrat
9	Kab. Boyolali	4	240.682	44,55	PDIP;PKB
10	Kab. Klaten	3	397.106	64,23	PDIP; PKS; P.Demokrat
11	Kab. Sukoharjo	3	199.612	49,33	PDIP
12	Kab. Wonogiri	4	236.645	40,36	PAN; Gerindra; PPP
13	Kab. Karanganyar	3	271.040	59,70	PDIP; PKS, PKPB; P.Pelopor
14	Kab. Sragen	5	265.648	50,66	P.GOLKAR, PAN, PPP
15	Kab. Grobogan	4	296.047	41,35	P.GOLKAR
16	Kab. Blora	3	243.715	59,73	P.Demokrat; PPP;PKB;Hanura; PPIB;PDIP
17	Kab. Rembang	5	187.106	55,96	P.Demokrat
18	Kab. Pati (I)	6	204.606	28,40	PKS, PKB, PPD, P. Gerindra, P. Hanura, PKPB, PPI
	Putaran II	Terdapat pemungutan suara ulang di Kabupaten Pati yang sedianya dilaksanakan Tahun 2011 ditunda pada tahun 2012			
19	Kab. Kudus	4	133.776	43,88	PDIP; P.GOLKAR
20	Kab. Jepara	3	241.333	56,21	PPP;P.Demokrat;PDS
21	Kab. Demak	4	377.644	74,38	PKB; P. GOLKAR, PPP, PKS
22	Kab. Semarang	3	205.382	44,74	PDIP; P.Demokrat; PAN; P.Hanura
23	Kab. Temanggung	3	145.323	35,10	P.GOLKAR; P. Demokrat
24	Kab. Kendal	5	207.116	43,22	PDIP
25	Kab. Batang	3	171.184	40,42	P. Golkar, PPP, PAN, PDP, PPRN, PKNU, P. Pelopor, P. Barnas, PBR, PNIM, P. Republikan, P. Demokrat
26	Kab. Pekalongan	4	254.762	56,73	P. Demokrat, PKNU, PPP dan P. Gerindra
27	Kab. Pemasang	4	264.224	46,52	PDIP
28	Kab. Tegal	4	261.855	42,68	PDIP
29	Kab. Brebes	4	351.539	45,72	PDIP
30	Kota Magelang	4	27.170	43,53	PDIP; PAN; PKS
31	Kota Surakarta	2	248.243	90,09	PDIP
32	Kota Salatiga	4	42.396	43,10	PKPI, PRN
33	Kota Semarang	5	211.323	34,28	PDIP
34	Kota Pekalongan	3	53.963	53,08	P.GOLKAR
35	Kota Tegal	5	88.329	70,96	PDIP; PKS;P.Demokrat; PPP
Provinsi (Gubernur)		5	6.084.261	43,44	PDIP

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

Tabel 16. Kepala Daerah Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Jabatan Sebelumnya dan Tanggal Pelantikan

No	Kabupaten/Kota	Nama Bupati/Walikota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan/Pekerjaan sebelumnya	Tanggal Pelantikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Cilacap	H. Tatto Suwarto Pamuji	Laki-laki	STM	Pengusaha	16 Mei 2011
2	Kab. Banyumas	Drs. H. Mardjoko, M.M	Laki-laki	S2	Pensiunan PNS	11 April 2008
3	Kab. Purbalingga	Drs. H. Heru Sudjtmoko, M.Si	Laki-laki	S2	PNS	27 Juli 2010
4	Kab. Banjarnegara	H. Sutedjo Slamet Utomo, SH, M.Hum	Laki-laki	S2	PNS Pemkab Banjarnegara	18 Oktober 2011
5	Kab. Kebumen	H. Buyar Winarso, S.E	Laki-laki	S1	Pengusaha	26 Juli 2010
6	Kab. Purworejo	Drs. Mahsun Zain, M.Ag	Laki-laki	S2	Bupati Purworejo 2005-2010	30 Oktober 2010
7	Kab. Wonosobo	Drs. H. Abdul Kholiq Arif, M.Si	Laki-laki	S2	Bupati Wonosobo 2005-2010	30 Oktober 2010
8	Kab. Magelang	Ir. H. Singgih Sanyoto	Laki-laki	S1		12 Januari 2009
9	Kab. Boyolali	Drs. Seno Samodro	Laki-laki	S1	Wakil Bupati Boyolali	3 Agustus 2010
10	Kab. Klaten	H. Sunarna, S.E, M.Hum	Laki-laki	S2	Bupati Klaten 2005-2010	2 Desember 2010
11	Kab. Sukoharjo	Wardoyo Wijaya, SH, MH	Laki-laki	S2	Anggota DPRD Sukoharjo	1 September 2010
12	Kab. Wonogiri	H. Danar Rahmanto	Laki-laki	SMU	Pengusaha	1 November 2010
13	Kab. Karanganyar	Dr. Hj. Rina Iriani SR, M. Hum	Perempuan	S2	Bupati Karanganyar 2003-2008	15 Desember 2008
14	Kab. Sragen	Agus Fatchur Rahman, SH, MH	Laki-laki	S2	Bupati Sragen 2001-2006	4 Mei 2011
15	Kab. Grobogan	H. Bambang Pudjiono, SH	Laki-laki	S1	Wakil Bupati Grobogan	13 Maret 2011
16	Kab. Blora	Djoko Nugroho	Laki-laki		Mantan Dandim Rembang	11 Agustus 2010
17	Kab. Rembang	H. Moch. Salim	Laki-laki		Bupati Rembang 2005-2010	20 Juli 2010
18	Kab. Pati*)					
19	Kab. Kudus	H. Musthofa	Laki-laki	Diploma	Anggota DPRD Prov Jateng	
20	Kab. Jepara	Drs. Hendro Martojo, MM	Laki-laki	S2	Bupati Jepara 2002-2007	5 Maret 2007
21	Kab. Demak	Drs. Tafta Zani, MM	Laki-laki	S2	Bupati Demak	3 Mei 2011
22	Kab. Semarang	Dr. Mudjirin, S.E, Sp.OG	Laki-laki	S2	Direktur RSUD Bina Kasih Ambarawa	28 September 2010

Tabel 16 (Lanjutan)

No	Kabupaten/Kota	Nama Bupati/Walikota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan/Pekerjaan sebelumnya	Tanggal Pelantikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	Kab. Temanggung	Drs. H. Hasyim Afandi	Laki-laki	S1	Pensiunan PNS	28 Juli 2008
24	Kab. Kendal	dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM	Perempuan	S2	Anggota DPRD Kab. Kendal	23 Agustus 2010
25	Kab. Batang	Yoyok Riyo Sudibyo	Laki-laki	Akmil	Bupati Batang 2002-2007	13 Februari 2012
26	Kab. Pekalongan	Drs. H. Amat Antono, M.Si	Laki-laki	S2	Wakil Bupati Pekalongan	27 Juni 2011
27	Kab. Pemalang	Junaedi, S.H, M.M	Laki-laki	S2	Wakil Bupati Pemalang	24 Januari 2011
28	Kab. Tegal	Agus Riyanto, S.Sos, M.M	Laki-laki	S2	Bupati Tegal 2004-2009	8 Agustus 2009
29	Kab. Brebes	H. Agung Widyantoro, SH, M.Si	Laki-laki	S2	Wakil Bupati Brebes 2007-2011	10 Mei 2011
30	Kota Magelang	Ir. Sigit Widyonindito, MT	Laki-laki	S2	PNS	30 Agustus 2010
31	Kota Surakarta	Ir. H. Joko Widodo	Laki-laki	S1	Walikota Surakarta 2005-2010	28 Juli 2010
32	Kota Salatiga	Yuliyanto, S.E, M.M	Laki-laki	S2	Wiraswasta	11 Juli 2011
33	Kota Semarang	Drs. Soemarmo HS, M. Si	Laki-laki	S2	PNS Pemkot Semarang	19 Juli 2010
34	Kota Pekalongan	dr. Mohammad Basyir Ahmad	Laki-laki	S1	Walikota Pekalongan 2005-2010	9 Agustus 2010
35	Kota Tegal	H. Ikmal Jaya, SE Ak	Laki-laki	S1	Pengusaha	23 Maret 2009
	Gubernur	H. Bibit Waluyo	Laki-laki	AKABRI (AD)	PANGKOSTRAD (2002)	23 Agustus 2008

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah

*) Catatan : Terdapat pemungutan suara ulang di Kabupaten Pati yang sedianya dilaksanakan Tahun 2011 ditunda pada Tahun 2012

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *Statistik Politik 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. 2009. *Kilasan Pemilu 2009 di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: KPU Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 22 tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang nomor 10 tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Referensi Internet

<http://www.bps.go.id>

<http://www.wikipedia.org>

<http://www.jatengprov.go.id>

<http://www.kpu-jatengprov.go.id>

<http://www.cilacapkab.go.id>

<http://www.banyumaskab.go.id>

<http://www.purbalinggakab.go.id>

<http://www.banjarnegarakab.go.id>

<http://www.magelangkab.go.id>

<http://www.wonogirikab.go.id>

<http://www.karanganyarkab.go.id>

<http://www.sragenkab.go.id>

<http://www.brebesskab.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
Provinsi Jawa Tengah**

Jl.Pahlawan No 6, Semarang
Telp. (024) 8412802 Fax. (024) 8311195
Homepages: <http://jateng.bps.go.id>
e-mail bps.3300@bps.go.id